

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Indriyanto Seno. (2009). *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*. Jakarta: Diadit Media.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Atmosudirjo, Prajudi. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (1998), Gramedia Pustaka Utama, Hal. 35-36. Jakarta
- Hadjon Philipus M. et.al. (2011). *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon Philipus M. et.al. (2012). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Harahap, Yahya. (2006). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jhonny Ibrahim. (2013). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Marbun. S.F., *Hukum*,(2013). *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Minarno, Nur Basuki. (2011). *Penyalahgunaan Wewenang dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Permana, Tri Cahya Indra. (2016). *Catatan Kritis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Genta Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2019). *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Saputra, M. Nata. (1988). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press
- Soemitro, Rochmat. (1976). *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Bandung. PT Eresco.
- Supandi. (2016). *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*. Bandung: Alumni.

B. JURNAL

- Antoro, Bibianus Hengky Widhi. 2020. *Pengujian Penyalahgunaan wewenang di PUTN. Jurnal Yudisial*. Volume 13 No.2 (Agustus 2020)
- Yulius, “Pemikiran dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 4, Nomor 3, 2015,
- Aman Susanto, *Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di Ptun Pasca Disahkannya Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017
- Lizamul Umam, *Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang*, Tesis, Universitas Andalas, 2017
- Arma Devi, “Penyalahgunaan wewenang dalam perspektif Tindak Pidana Korupsi”, *Jurna Recthen*, Vol 1, Nomor 1, 2019

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
- Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016

D. INTERNET

Hukum Online, “*Arti Menyalahgunakan wewenang dalam tindak pidana korupsi*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54fbbf142fc22/arti-menyalahgunakan-wewenang-dalam-tindak-pidana-korupsi/>, diakses pada tanggal 18 November 2021.

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta , “*Sejarah Pengadilan*”, https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=14, diakses pada tanggal 24 Mei 2022.

E. KAMUS

Arifin, Winarsih. dan Farida Soemargono. (2001). *Kamus Perancis Indonesia, Dictionnaire francais indonesie*. Cetakan 4, Jakarta: P.T Gramedia Pustaka Utama.